BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

b. bahwa untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap IKU pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus **2014**
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus **2014**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 31 Tahun 2014
Tanggal : 20 Agustus 2014

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD).	APK PAUD	%	Jumlah Siswa dijenjang TK/RA/Penitipan Anak ------------------------------ x 100% Jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 tahun.	APM SD/MI	%	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI ------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP/MTs	%	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs ------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		AL SD/MI	%	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ------------------------------ x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		AL SMP/MTs	%	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ------------------------------ x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SD/MI	%	Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ------------------------------ x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6
		APS SMP/MTs	%	Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ---------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaranp pelaksanaan Pendidikan menengah.	APM SMA/MA/SMK	%	Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA -------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 16-18 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		AL SMA/MA/SMK	%	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ---------------------------------- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SMA/MA/SMK	%	Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA -------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal.	Angka melek huruf	%	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah lama sekolah penduduk usia 15 thn ke atas ---------------------------------- Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan luar biasa.	Angka Partisipasi penduduk Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Formal	%	Jumlah penduduk Berkebutuhan Khusus Yang mengenyam pendidikan formal ------------------------ x 100 % Jumlah penduduk Berkebutuhan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan tinggi	Rasio lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 perjumlah penduduk	Rasio	Jumlah penduduk lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 ---------------------------------- Jumlah penduduk	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK	%	Jumlah pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 ------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pendidik SD, SMP, SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase pendidik bersertifikasi	%	Jumlah pendidik yang bersertifikasi ------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pendidik SD, SMP, SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Optimalnya manajemen pelayanan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	Jumlah Sekolah SD/MI ------------------------------ x 10.000 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	Jumlah Sekolah SMP/MTs ------------------------------ x 10.000 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	Rasio	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA ------------------------------ x 10.000 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio guru/murid SD/MI	Rasio	Jumlah Guru SD/MI -------------------- x 10.000 Jumlah Murid SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio guru/murid SMP/MTs	Rasio	Jumlah Guru SMP/MTs ---------------------- x 10.000 Jumlah Murid SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio guru/murid SMA/MA/SMK	Rasio	Jumlah Guru SMA/SMK/MA ------------------------- x 10.000 Jumlah Murid SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6
9	Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Kasus HIV	%	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ------------------ x 100% Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan
		Rasio posyandu per 100 balita	Rasio	Jumlah posyandu ---------------------------- x 100 Jumlah balita	Dinas Kesehatan
		Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	Rasio	Jumlah puskesmas ---------------------------- x 100.000 Jumlah total penduduk	Dinas Kesehatan
		Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk	Rasio	Jumlah poliklinik / polindes ---------------------------- x 10.000 Jumlah total penduduk	Dinas Kesehatan
		Rasio pustu per 10.000 penduduk]	Rasio	Jumlah pustu ---------------------------- x 10.000 Jumlah total penduduk	Dinas Kesehatan
		Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	Rasio	Jumlah Rumah Sakit ---------------------------- x 100.000 Jumlah total penduduk	Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio	Jumlah tenaga dokter ---------------------------- x 100.000 Jumlah total penduduk	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana Kesehatan Strata 1 -------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis	%	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis -------------------------------- x 100 % Jumlah total penduduk	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian bayi	per 1000 KLH	Jumlah bayi yang meninggal di wilayah tertentu -------------------------- x 1000 Jumlah bayi di wilayah tertentu	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
		Angka kematian balita	per 1000 KLH	Jumlah anak berumur < 5 tahun yang meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun ---------------------------- x 1000 Jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu	per 1000 KLH	Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun ------------------------------ x 1000 Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita gizi buruk	%	Jumlah balita gizi buruk ------------------- x 100% Jumlah balita	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita gizi Kurang	%	Jumlah balita gizi kurang --------------------- x 100% Jumlah balita	Dinas Kesehatan
		Angka kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	Jumlah Malaria Positif di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu ------------------------ x 1000 Jumlah penduduk Berisiko di wilayah yang sama	Dinas Kesehatan
		Tingkat kematian karena tuberkulosis	per 100.000 penduduk	Jumlah pasien TB yang meninggal ----------------------- x 100.000 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan
		Prevalensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	Jumlah pasien TB ----------------------- x 100.000 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu -------------------------- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ------------------------- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	Jumlah Desa / Kelurahan UCI ------------------------- x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	%	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------- x 100% Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	%	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 ------------------------- x 100% Jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun	Dinas Kesehatan
10	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan kepada anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	persentase pekerja perempuan ------------------------- x 100 % Persentase angakatan kerja perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan ------------------------- x 100 % Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11	Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB.	Cakupan peserta KB aktif	%	Jumlah peserta Program KB aktif ------------------------- x 100 % Jumlah pasangan usia subur	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6
12	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	Jumlah Benda cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan
		Jumlah Peristiwa Budaya	Event	Jumlah peristiwa budaya yang diselenggarakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan kepustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah ----------------------- x 100% Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip
14	Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Kantor Perpustakaan dan Arsip
15	Terwujudnya kemandirian pemuda	Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan	kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan (LSM, Ormas dan OKP)	Dinas pariwisata pemuda dan olahraga
16	Meningkatnya prestasi dalam dunia olah raga	Prestasi olahraga Tingkat Propinsi / PORDA	Peringkat	Cukup jelas	Dinas pariwisata pemuda dan olahraga
17	Meningkatnya kualitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai keagamaan	Angka melek aksara Quran	%	Jumlah penduduk muslim yang mampu baca quran ----------------------- x 100% jumlah penduduk muslim	Bag. Kesra Setda
18	Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing	Kunjungan wisatawan	Wisatawan	Menunjukkan jumlah total wisatawan per tahun	Dinas pariwisata pemuda dan olahraga
		Jumlah event pariwisata	Event	Cukup jelas	Dinas pariwisata pemuda dan olahraga
19	Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Beras	%	Ketersediaan pangan/ beras untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun) ----------------------------- x 100% Konsumsi beras untuk bahan makanan (ton/tahun)	Dinas tanaman pangan dan hortikultura

1	2	3	4	5	6
20	Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Kw/Ha	Produksi padi (Kw) / Luas panen padi (Ha)	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
21	Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan	Produksi Pangan Utama Beras	Ton	Cukup jelas	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
		Produksi Komoditi Palawija	Ton	Cukup jelas	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
		Produksi Komoditi Buah-buahan	Ton	Cukup jelas	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
		Produksi Komoditi Sayur-sayuran	Ton	Cukup jelas	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
		Persentase Ketersediaan Pangan Palawija	%	Ketersediaan pangan/ umbi-umbian untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun) / Konsumsi umbi-umbian untuk bahan makanan (ton/tahun) x 100%	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
		Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan	%	Ketersediaan pangan/ buah-buahan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun) / Konsumsi buah-buahan untuk bahan makanan (ton/tahun) x 100%	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
		Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran	%	Ketersediaan pangan/ sayur-sayuran untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun) / Konsumsi sayur-sayuran untuk bahan makanan (ton/tahun) x 100%	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
22	Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas	Jumlah produksi perkebunan :			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		- Kelapa Sawit	ton	Cukup jelas	
		- Karet	ton	Cukup jelas	
		- Kakao	ton	Cukup jelas	
		- Kelapa	ton	Cukup jelas	
		- Sagu	ton	Cukup jelas	

1	2	3	4	5	6
23	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan	Jumlah hasil produksi komoditas peternakan:			Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
		- Daging	ton	Cukup jelas	
		- Telur	ton	Cukup jelas	
24	Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan	Konsumsi Daging	Ton	Konsumsi per kapita per tahun x Jumlah penduduk	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
25	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan	Jumlah produksi hasil perikanan tangkap	Ton	Cukup jelas	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Cukup jelas	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
26	Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan	Konsumsi ikan	Ton	Konsumsi per kapita per tahun x Jumlah penduduk	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
27	Terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat	Persentase elektrifikasi yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	$\frac{\text{Persentase elektrifikasi Energi Baru Terbarukan}}{\text{Total Persentase Elektrifikasi}} \times 100\%$	Dinas Pertambangan dan Energi
28	Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha	Persentase kenaikan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama	%	Cukup jelas	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
29	Meningkatnya peran industri kecil menengah.	Pertumbuhan Industri	%	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun n - Jumlah industri tahun n - 1}}{\text{Jumlah industri tahun n - 1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
30	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor berskala nasional	Investor	Cukup jelas	Badan Penamaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional	Milyar Rupiah	Cukup jelas	Badan Penamaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

1	2	3	4	5	6
		Jumlah izin prinsip yang diterbitkan	Izin prinsip	Cukup jelas	Badan Penamaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Lama proses perijinan	Hari Kerja	Cukup jelas	Badan Penamaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
31	Meningkatnya cakupan penanganan PMKS	Persentase Penduduk Miskin	%	Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin ------------------------ x 100 % Jumlah penduduk	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32	Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan	Jumlah UED-SP	UED-SP	Cukup jelas	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
33	Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Jumlah LPM aktif	LPM	Cukup jelas	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
34	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	UMKM	Cukup jelas	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
35	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	Jumlah Koperasi aktif -------------------- x 100 % Jumlah seluruh Koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
36	Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Jumlah penduduk Angkatan Kerja ------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Pengangguran terbuka	%	Jumlah Pengangguran ------------------ x 100 % Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6
37	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	%	Jumlah pekerja/ buruh yang menjadi peserta jamsostek ---------------------- x 100% jumlah pekerja/buruh	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase UMR terhadap KHL	%	UMR ---------- x 100% KHL	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38	Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%	Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran --------------------------- x 100 % Jumlah penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KTP	%	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP --------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39	Terbangunnya sistem informasi kependudukan	Lama maksimal proses pengurusan:			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		- KTP	hari	Cukup jelas	
		- Akte pencatatan sipil	hari	Cukup jelas	
		- KK	hari	Cukup jelas	
40	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Jumlah panjang jaringan jalan dalam kondisi baik -------------------------- x 100% Jumlah seluruh panjang jaringan jalan di daerah tersebut	Dinas Bina Marga dan Pengairan
41	Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi	Panjang Drainase yang dibangun	Meter	Cukup jelas	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Jumlah jaringan irigasi dlm kondisi baik -------------------------- x 100% Jumlah seluruh jaringan irigasi di daerah tersebut	Dinas Bina Marga dan Pengairan

1	2	3	4	5	6
42	Meningkatnya kualitas air baku dan air bersih	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	Penduduk yang berakses air minum yang aman -------------------------- x 100% Jumlah penduduk	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
43	Terkendalinya banjir	Cakupan pengendalian banjir	%	Panjang leoning yang dibangun -------------------------- x 100% Total kebutuhan pembangunan leoning	Dinas Bina Marga dan Pengairan
44	Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan	Panjang semenisasi jalan desa yang dibangun	meter	Cukup jelas	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
45	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah	Persentase elektrifikasi	%	Jumlah pelanggan PLN -------------------------- x 100% Jumlah perumahan	Dinas Pertambangan dan Energi
46	Meningkatnya kualitas perumahan	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni -------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemda	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
47	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang daerah	Jumlah dokumen RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Cukup jelas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
48	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang	Persentase rumah ber-IMB	%	Jumlah rumah ber-IMB ------------------------------ x 100 % Jumlah total rumah wajib IMB	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
49	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Hari	Cukup jelas	Dinas Perhubungan dan Infokom
50	Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman	Persentase angkutan darat	%	Jumlah angkutan darat ---------------------------- x 100 % Jumlah penumpang angkutan darat	Dinas Perhubungan dan Infokom
51	Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Persentase penanganan sampah	%	Volume sampah yang ditangani (m3) ---------------------------- x 100 % Volume produksi sampah (m3)	Dinas pasar, kebersihan dan pertamanan
52	Terlindunginya dan terkonservasinya sumberdaya alam	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ---------------------------- x 100 % Luas total hutan dan lahan kritis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Kerusakan kawasan hutan	%	Luas kerusakan kawasan hutan ---------------------------- x 100 % Luas kawasan hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1	2	3	4	5	6
53	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Jumlah dokumen database SDA dan LH	Dokumen	Cukup jelas	Badan Lingkungan Hidup
54	Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan	Jumlah titik panas	Hot spot	Cukup jelas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
55	Terkelolanya RTH	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	Luas ruang terbuka hijau -------------------- x 100% Luas wilayah ber HPL / HGB	Dinas pasar, kebersihan dan pertamanan
56	Tersedianya sistem informasi pertanahan	Jumlah sistem informasi pertanahan daerah	Sistem	Cukup jelas	Bag. Pertanahan Setda
57	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	%	Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan ------------------------- x 100 % Jumlah konflik pertanahan yang terdaftar	Bag. Pertanahan Setda
58	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Cakupan lahan bersertifikat	%	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah -------------------------x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat	Bag. Pertanahan Setda
59	Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan sinergis	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Cukup jelas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Cukup jelas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	Cukup jelas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	%	Jumlah program RKPD -------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6
60	Terwujudnya implementasi desentralisasi politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah	%	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada (Kab / Prov) ------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib memilih	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	%	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif ------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib memilih	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu PilPres	%	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu PilPres ------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib memilih	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
61	Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan	Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan)	%	Nilai PAD ------------------x 100 % Nilai pendapatan daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
62	Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif	Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda	Cukup jelas	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perbup	Cukup jelas	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
63	Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	Cukup jelas	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat	Cukup jelas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
64	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah	Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah	%	Jumlah capaian kinerja sasaran ---------------------- x 100% Jumlah sasaran kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6
65	Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat	Jumlah gangguan kantramtibmas	Gangguan	Cukup jelas	Satuan Polisi Pamong Praja
66	Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa	Rasio	Jumlah desa memiliki dokumen rencana desa (RPJMDes & RKPDes) / Jumlah desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
67	Adanya kepastian tentang kewenangan yang dimiliki oleh desa, melalui penyerahan sebahagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada desa serta pelaksanaan kewenangan asli desa.	Perda tentang pembagian kewenangan Kabupaten dan Desa	Perda	Cukup jelas	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
68	Terwujudnya kemadirian keuangan desa	Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa	%	$\frac{\text{PADesa}}{\text{Pendapatan Desa}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
69	Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Rasio Desa Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati	Rasio	Jumlah Desa Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati / Jumlah Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kecamatan se-Kabupaten Siak

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR